

Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Desa Lemukih Buleleng)

Gede Henry Dharmawan Urdaneta¹, Ni Kadek Sinarwati²



^{1,2}Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

*Corresponding author: gedeherrydharmawanurdaneta12@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Alasan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lemukih rendah, (2) Alasan Partisipasi masyarakat Desa Lemukih dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa rendah, (3) Kendala mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lemukih, (4) Kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah digunakan di Desa Lemukih. Pendekatan yang digunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Masyarakat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Akuntabilitas di Desa Lemukih masih rendah karena untuk membuat baliho ke kota jaraknya cukup jauh, dan untuk printoutnya hanya dibagikan ke Kepala Banjar saja, karena jumlah penduduknya cukup banyak, 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Lemukih masih rendah karena pengetahuan dari masyarakat tentang pentingnya partisipasi masih kurang, 3) Terdapat beberapa kendala seperti jarak dari Desa ke Kota yang cukup jauh serta akses jalan banyak yang rusak karena di Desa Lemukih tidak terdapat jasa pembuatan baliho, 4) Kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu kurangnya minat dan niat dari masyarakat itu sendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes.

Keywords: Analisis, Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Abstract

This study aims to find out (1) Reason Accountability of managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Lemukih Village is low, (2) Reason Lemukih Village community participation in overseeing the Village Revenue and Expenditure Budget is low, (3) Obstacles in realizing accountability in Revenue Budget management and Village Expenditures in Lemukih Village, (4) Obstacles in realizing community participation in Accountability for the use of the Village Revenue and Expenditure Budget that have been used in Lemukih Village. The research approach used is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation studies. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research subjects were the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Village Community. The results show that 1) Accountability in Lemukih Village is still low as evidenced by the absence of billboards and the village government does not distribute printouts to the community, 2) Community participation in the management of APBDes in Lemukih Village is still low because knowledge from the community about the importance of participation is still lacking, 3) There are several obstacles such as the distance from the village to the city which is quite far and many road accesses are damaged because in Lemukih Village there is no billboard making service, 4) Obstacles in realizing community participation are the lack of interest and intention from the community itself to participate in the management APBDes.

Keywords: Analysis, Accountability, Management of the Village Revenue and Expenditure Budget.

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under

a Creative Commons Attribution 3.0 License



Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut definisi universal merupakan aglomerasi permukiman di kawasan pedesaan. Desa adalah suatu pemerintahan yang berbentuk paling terkecil dan istilah Desa juga berarti pembagian administratif, di bawah pemerintahan kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa di Republik Indonesia..

Desa dapat diartikan sebagai suatu organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dimana segala kepentingan dan kebutuhannya mempunyai kewajiban yang fundamental, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana isinya mengatur keuangan dan aset Desa yang rencananya akan memberikan pelayanan pada masyarakat yaitu yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di suatu Desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Perhatian yang besar terhadap Desa itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan Desa seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan Desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar Desa sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran yang telah dibuat oleh Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Bantuan Langsung dana Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah pusat memberikan pembagian dana Desa dengan rincian dana setiap Kabupaten dibagikan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan teori pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Pembangunan prasarana jalan akan membuat masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai

kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat diperlukan Dalam melaksanakan program pembangunan desa. Strategi yang bisa diterapkan adalah penyadaran. Warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan emosional guna tercapainya program tersebut.

Pemerintah pusat memiliki strategi untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom yaitu dengan memberikan Dana Desa yang nantinya dibuatkan APBDes oleh desa secara lebih sfesifik. Menurut keterangan dari Kepala Desa Lemukih penggunaan dana APBDes adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan APBDes, partisipasi masyarakat, kendala-kendala dalam penyaluran APBDes, serta kendala weujudkan partisipasi masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. (Wahjudin Sumpeno, 2019).

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Akuntabilitasnya masih kurang baik dijalankan, dan belum terdapat informasi di papan pengumuman atau papan informasi di setiap banjar mengenai berapa jumlah pengeluaran dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan juga masalah yang ditemukan yaitu partisipasi masyarakat di Desa Lemukih masih perlu dimaksimalkan karena berdasarkan keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa masyarakat lebih memilih untuk tidak ingin tahu mengenai pengelolaan APBDes. Beberapa penelitian terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes ini salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faridah dan Suryono, (2015) dengan judul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu kecamatan sangkapura kabupaten gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di desa tersebut sudah berjalan baik walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Lemukih yaitu sesuai dengan permasalahan yang ditemui peneliti mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini dilakukan mengingat pentingnya sebuah Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Partisipasi Masyarakat agar nantinya pemberdayaan, pemerataan pembangunan, pelayanan masyarakat yang lebih efektif, termasuk pengentasan kemiskinan struktural dapat tercapai guna membangun Desa yang mandiri dan sejahtera. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisis Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Desa Lemukih Buleleng)”**.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan suatu analisis serta interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena (Sugiyono, 2017). Tujuan jenis data kualitatif yaitu digunakan sebagai bahan informasi untuk suatu analisis data kualitatif dimana jenis data ini akan dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian hasil

wawancara yang dilakukan peneliti serta hasil observasi mengenai keadaan umum dari Desa Lemukih yang merupakan objek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan Data Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif pada penelitian ini yang terjadi secara bersamaan (Moleong,2017) adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lemukih masih rendah.

Data yang diperoleh dari Hasil wawancara di Desa Lemukih adalah akuntabilitas Desa Lemukih rendah dan kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan yang telah direncanakan.

Data mengenai akuntabilitas pengelolaan APBDes yang masih rendah ini peneliti melakukan wawancara ke bagaian pemerintah desa dan juga masyarakat Desa Lemukih. Berdasarkan hasil wawancara kepada Sekerretaris Desa Gede Pasek Tangkas sebagai berikut :

“Ya, jadi kelemahan desa kami untuk akuntabilitas nike memang tidak adanya baliho terkait APBDes nike makanya bisa dikatakan rendah, tapi kami sudah membuat softcopynya dengan jujur karena di desa kami ini sudah berbabis online, atau sudah menggunakan sistem yang memang sudah ada sebelumnya yaitu SISKUDes, jadi dari mulai proses pengajuan, pencairan, sampai pembayaran sudah diatur dalam satu aplikasi yang memang sudah di kontrol oleh kabupaten, nggih kedepannya kami akan mencetak baliho nike biar lebih jelas lagi pengelolaan APBDesnya”.

Pertanyaan yang di sampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa Lemukih tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Lemukih Bapak Drs. I Nyoman Singgih, pernyataan tersebut diacantumkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Nggih dik jadi memang bisa dibilang akuntabilitas desa kami masih rendah terutama terkait dengan baliho yang tidak dipasang, itu karena akses dari desa kami ke kota untuk membuat baliho cukup jauh dan juga jalanan banyak yang rusak, sehingga terhambat juga dalam proses pembuatan balihonya, untuk printoutnya kami hanya bagikan ke kadus saja karena jumlah masyarakat terbilang cukup banyak, namun kedepannya kami pasti akan memasang baliho biar seluruh warga yang lewat kantor desa bisa melihat pengelolaan APBDesnya”

Tidak hanya pemerintah desa saja, tetapi penulis juga menanyakan mengenai akuntabilitas APBDes yang masih rendah kepada masyarakat Desa Lemukih, berikut adalah penyampaian dari masyarakat yaitu :

“Akuntabilitas untuk pengelolaan APBDes rendah nike saya rasa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dengan seluruh masyarakat Desa sendiri dik, dan juga mungkin Pemerintah Desa belum mengetahui pentingnya akuntabilitas, mungkin adik bisa memberikan masukan untuk Desa kami biar sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebenarnya, tidak kenapa adik memberikan masukan karena ini kan menjadi pembenahan untuk Desa Lemukih”.

Berdasarkan pemaparan di atas dinyatakan bahwa akuntabilitas di Desa Lemukih memang sudah baik dan terbuka tetapi hal tersebut tidak di dukung oleh adanya informasi di papan pengumuman atau baliho mengenai pengelolaan APBDes yang dikarenakan oleh jarak dari Desa ke Kota yang cukup jauh, sehingga pembuatan baliho menjadi tertunda secara terus menerus sedangkan untuk printout tidak dibagikan ke masyarakat karena jumlah masyarakat terbilang cukup banyak sehingga hanya dibagikan ke masing-masing Kepala banjar.

Data mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas, peneliti melakukan wawancara ke bagaian Pemerintah desa dan juga masyarakat Desa Lemukih. Berdasarkan hasil wawancara Bendahara Desa Gede Pasek Somadana S.E, sebagai berikut :

“Iya jadi tentunya untuk hasil pelaksanaannya ini memang sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya telah direncanakan oleh desa kami, tetapi kembali lagi ke penilaian masyarakat di desa mengenai hasil yang sudah dicapai, sebagai contoh saja kita merencanakan untuk perbaikan jalan di masing-masing banjar yang ada di Desa kami, dan saat ini perbaikan tersebut sejauh ini sudah berjalan dengan baik”.

Pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Bendahara Desa Lemukih tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Lemukih Drs. I Nyoman Singgih, pernyataan tersebut diacantumkan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Yak untuk hasil pelaksanaan programnya niki sudah sesuai, dan paling tidak kita sudah dapat memenuhi sasaran 95% dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Contoh hasilnya yaitu kita lebih ke kesehatan, pendidikan dan insfrastruktur”.

Tidak hanya Pemerintah Desa saja, tetapi penulis juga menanyakan mengenai akuntabilitas APBDes kepada masyarakat Desa Lemukih, berikut adalah penyampaian dari masyarakat yaitu :

“Yang tiang lihat sejauh ini sudah sesuai dik, meskipun ada beberapa perencanaan yang memang belum terealisasi, mungkin disebabkan oleh cuaca niki yang tidak menentu disini”

Berdasarkan Pemaparan di atas diketahui bahwa hasil pelaksanaan program APBDes yang dilakukan oleh Desa Lemukih telah sesuai dengan apa yang memang sudah direncanakan sebelumnya, hanya saja mungkin beberapa persen memang belum bisa di realisasikan.

Partisipasi Masyarakat Desa Lemukih Dalam Mengawal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Masih Rendah

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di Desa Lemukih mengenai Partisipasi masyarakat yang rendah dalam kesediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian, dan keterampilan dalam mengawal APBDes serta hasil observasi.

Hasil wawancara Bapak Gede Pasek Tangkas selaku Sekeretaris Desa Lemukih sebagai berikut:

“Nggih menurut tiang karena kesalahan kita diawal yaitu kami belum memasang baliho terkait APBDes niki, dan ketika kami sudah memasangnya kami yakin dan akan berusaha agar partisipasi masyarakat di desa kami menjadi meningkat”.

Pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa Lemukih tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Drs. I Nyoman Singgih. Pernyataan tersebut dicantumkan dalam hasil wawancara berikut :

“Nggih jadi kalau dilihat niki partisipasi masyarakat di Desa kami memang bisa dikatakan rendah, dan mungkin kebanyakan dari mereka niki sibuk dengan pekerjaan mereka, kita selalu berpikiran seperti itu, karena kita juga tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat dan kita akan tetap melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, agar partisipasinya juga meningkat”

Beraskan pemaparan di atas dapat kita ketahui bersama bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes sangat penting untuk dilakukan, selain itu masyarakat juga harus mau kesediaannya untuk memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian, dan keterampilan karena ini akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat kepedannya, mengenai kesediaan masyarakat tersebut dapat di dukung oleh pernyataan dari Kepala Desa dalam hasil wawancara berikut:

“Ya kalau sumbangan berupa pikiran cukup banyak yang mau, kalau keahlian dan keterampilan mungkin ya misalnya saat perbaikan jalan pasti ada beberapa warga yang mau ikut dan itupun orang yang mengerti tentang hal itu dik”.

Pernyataan lain juga disajikan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lemukih dalam hasil wawancara berikut :

“Jadi kalau masyarakat mau menyumbang pikiran, keahlian dan keterampilan tentunya tidak bisa sembarangan dik, jadi harus saat kegiatan *paum* atau kegiatan yang memang melibatkan masyarakat banyak niki, tapi pada saat ada kegiatan kebanyakan hanya dari kadus saja yang memberikan masukan niki”

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat Desa Lemukih bisa dikatakan rendah dan kesediaan masyarakat dalam menyumbang pikiran, keahlian, dan keterampilan juga minim hal tersebut dikarenakan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi masih rendah, jadi pemerintah desa harus memikirkan dan menerapkan strategi atau memberikan gagasan kepada masyarakat desa khususnya Desa Lemukih agar masyarakat desa mau untuk ikut berpartisipasi membangun desa, karena pembangunan di desa akan dinikmati juga oleh masyarakat desa itu sendiri.

Adapun juga hasil wawancara kepada Kepala Desa Bapak Drs. I Nyoman Singgih mengenai strategi pemerintah yang akan dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut :

“Ya jadi kita tentunya memberikan gagasan akan pentingnya peran partisipasi masyarakat di desa kami untuk ikut mengontrol penuh setiap pembangunan yang ada di desa, karena nantinya pembangunan itu kita semua sebagai masyarakat Desa Lemukih juga yang akan menikmatinya, artinya dengan kata lain apabila pembangunan dilakukan dengan bagus maka akan panjang juga umur bangunan yang dibuat tersebut karena sudah dibuat berdasarkan struktur yang tepat”

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi kegiatan saat *paum* di atas dijelaskan bahwa masih banyak terdapat masyarakat Desa Lemukih yang belum berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes ini, meskipun masyarakat turut hadir akan tetapi

masyarakat hanya datang dan diam saja. Pemerintah desa sendiri sudah memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan memberikan gagasan mengenai pengelolaan APBDes terlebih dahulu dan kemudian akan selalu mengundang seluruh masyarakat desa dalam setiap pembangunan yang dilakukan di desa untuk ikut berpartisipasi. *Kendala dalam mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lemukih*

Data penelitian ini memperoleh hasil wawancara kepada pemerintah desa saja, karena hanya pemerintah desa yang mengetahui kendala apa saja dalam mewujudkan akuntabilitas APBDes. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Gede Pasek Tangkas mengenai kendalanya yaitu sebagai berikut :

“Untuk kendalanya nike yang pertama yaitu untuk transfer dana yang dilakukan oleh pusat nike tidak bisa kita terima di awal tahun anggaran, sehingga bila mana dana tersebut belum di transfer ke rekening desa maka seluruh program-program di APBDes belum bisa kita Jalankan, dan kendala lainnya berupa system pembuatan SPJ nike masih juga ada beberapa kendala mungkin karena jarak rekanan atau penyedia nike terbilang cukup jauh, itu yang membuat sistem pembuatan SPJ menjadi terhambat”.

Pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa Lemukih tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan langsung oleh Bapak Drs. I Nyoman Singgih selaku Kepala Desa Lemukih. Pernyataan tersebut dicantumkan dalam hasil wawancara berikut :

“Jadi yang menjadi kendala paling mendasar untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik yaitu karena lokasi kita jauh dari perkotaan, jadinya dalam pembuatan balihonya nike juga sulit, dan memang keadaan saat ini kami pemerintah desa sedang sibuk, jadi kami berharap partisipasi masyarakat untuk mau membantu kami”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan yaitu kendala dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini, seperti Lokasi Desa dan Waktu transfer dana yang terkadang agak lambat. Solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut adalah mungkin dengan dengan memperbaiki akses agar mobilitas lancar, dan juga dalam melaporkan realisasi anggran ke pusat itu harus lebih cepat agar dana berikutnya bisa di transfer juga lebih cepat.

Kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah digunakan di Desa Lemukih

Data penelitian ini diperoleh hasil wawancara kepada pemerintah desa. Berdasarkan wawancara dengan bapak Gede Pasek Somadana S.E selaku Bendahara Desa sebagai berikut :

“Untuk kendala di Lemukih ini sebetulnya itu-itu saja dik, jadi pernah ada pegawai kecamatan yang bilang kalau di Lemukih orang-orang yang mau berpartisipasi hanya itu-itu saja yang mau, tapi sekarang kita sedang berusaha agar omongan itu bisa kita jawab dengan bukti bahwa masyarakat kita mau berpartisipasi terkait APBDes ini, dan sekarang ini juga tokoh-tokoh penting ataupun orang rantauan kita ajak untuk ikut serta terkait APBDes ini”

Pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Bendahara Desa Lemukih tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan langsung oleh Bapak Drs. I Nyoman Singgih selaku Kepala Desa. Pernyataan tersebut dicantumkan dalam hasil wawancara berikut :

“Untuk kendalanya nike sejauh ini tentunya minat dari masyarakat nike masih kurang, tetapi kita tetap melaksanakan pendekatan yang baik kepada masyarakat, agar untuk kedepanya partisipasi masyarakat itu bisa tercapai tentunya akan lebih banyak yang mau ikut untuk membangun Desa Lemukih menjadi desa pariwisata yang akan dikenal oleh tamu mancanegara”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan yaitu, untuk mewujudkan partisipasi masyarakat itu memang perlu minat dari masyarakat itu sendiri untuk ikut serta membangun desa, dan tentunya harus ada solusi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat dan memberikan gagasan.

Implikasi dari dilakukannya penelitian mengenai Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lemukih adalah dapat mengetahui akuntabilitas peneglolaan APBDes, partsisipasi masyarakat, kendala dalam penyaluran APBDes, dan juga kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, serta solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah dalam pengelolaan APBDes di Desa Lemukih. Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan untuk akuntabilitas di Desa Lemukih masih kurang baik dijalankan, dan juga partisipasi masyarakatnya juga masih kurang, dan masih ada kendala penyaluran APBDes, serta terdapat kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan secara mendetail pada bab sebelumnya mengenai permasalahan maupun fenomena yang terdapat pada penelitian ini yang dikaitkan dengan hasil wawancara oleh narasumber terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya mengenai akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes, sehingga dapat diuraikan kesimpulan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas di Desa Lemukih masih dikatakan rendah karena untuk membuat baliho jarak yang di tempuh cukup jauh dan akses jalan masih banyak yang rusak, kemudian printout yang tidak dibagikan ke masyarakat itu karena jumlah masyarakat yang terbilang cukup banyak, tetapi printout tersebut hanya dibagikan ke masing-masing Kepala Banjar saja.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Lemukih masih rendah karena pengetahuan dari masyarakat tentang pentingnya partisipasi masih kurang serta disebabkan oleh kesibukan dari masyarakat Desa Lemukih.
3. Kendala dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini masih terdapat beberapa kendala seperti jarak dari Desa ke Kota yang cukup jauh serta akses jalan banyak yang rusak karena di Desa Lemukih tidak terdapat jasa pembuatan baliho, jadi wajib untuk pemeritah Desa membuat baliho ke kota, meskipun seharusnya untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik bisa memberikan hasil pengelolaan APBDes ke masyarakat berupa printout saja, tetapi agar lebih baik lagi maka diperlukan baliho
4. Kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu kurangnya minat dari masyarakat itu sendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes dan pemerintah Desa akan tetap melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat agar memiliki minat untuk partisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang di dapat pada penelitian ini, berikut adapun saran yang diberikan:

1. Bagi Pemerintah Desa Lemukih

Adapun saran yang diberikan untuk pemerintah Desa Lemukih alangkah baiknya untuk akuntabilitasnya sebaiknya segera memasang informasi di papan pengumuman atau memberikan hardcopy pengelolaan APBDes kepada masyarakat melalui kepala banjar, dan hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi partisipasi masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan kajian-kajian teori yang mampu mendukung penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mengapa minat dari masyarakat masih rendah untuk berpartisipasi dalam mengelola APBDes karena penelitian yang dilakukan ini disadari masih memiliki kekurangan.

Daftar Pustaka

- Faridah, Bambang Suryono. 2015. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 5.
- Hanifah, Suci Indah, Sugeng Praptoyo. 2015. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 8.
- Adiwirya, Muhammad Firdiansyah, I Putu Sudana. 2015. *Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Nafidah, Anisa. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmu Akuntansi.
- Liando, Leonardo Yosua, Linda Lambey, dkk. *Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA, Vol. 5 No. 2.
- Utami, Budi Putri. 2017. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes): Transparansi Dan Akuntabilitas Di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014*
- Orangbio, Vega Virginia, Jantje Tinangon, dkk. 2017. *ANALISIS PERENCANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Apbdes MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern

- Budiarta, Ketut (Kepala Desa Lemukih). 2020. Pendapat Tentang Partisipasi Masyarakat Desa Lemukih.
- Natalis, P. 2016. Indikator Variabel Akuntabilitas.
- Kumalasari, D. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: Vol. 5 No. 11, November 2016. STIESIA Surabaya.
- Anisa, L. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi* , Volume 10 (2).
- Fitriati. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoarjo. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Ramadanis. 2019. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal akuntansi dan ekonomika*, Vol. 9 No.1.
- Faradhiba, Laily dan Nur Diana. 2019. AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *E-JRA* Vol. 07 No. 07.
- Septiandana, Agnick Cintayun, dkk. 2019. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA KEBONSARI KECAMATAN YOSOWILANGUN - KABUPATEN LUMAJANG.
- Sangki, Adiarto Asdi, dkk. 2017. PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Skripsi FISIP-Unsrat.
- Soeharso. Efra. 2017. AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2015 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 DI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA. Vol. 4 No. 3.
- Rizal, dkk. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 14 Volume I.
- Indarriyanti, Henny dan Vivi Eka Setyawati. 2017. AKUNTABILITAS APBDES SEBAGAI PENENTU TINGKAT KREDIBILITAS APARATUR DESA (Studi Kasus di Kantor Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016). Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis.
- Wisastrawan, Ketut Teddy, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan I Nyoman Putra Yasa. 2020. PENGARUH AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WISATA (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar). *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 9 No 1.

- Devilaksmi, Ayu Trisna, I Nyoman Putra Yasa, dan Made Arie Wahyuni. 2019. IMPLEMENTASI AWIG-AWIG DALAM KONTROL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PELABA PURA (Studi Fenomenologi di Desa Pakraman Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). *JIMAT*. Vol 10 No 2.
- Putra, Putu Andi Suarjaya, Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 8 No 2.
- Darmada, Dewa Kadek, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Kadek Sinarwati. 2016. KEARIFAN LOKAL PADE GELAHANG DALAM MEWUJUDKAN INTEGRASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI SUBAK. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol 7 No 1.
- Rosielita, Febby, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Ni Kadek Sinarwati. 2017. IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 8 No 2